



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 15
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : Audiensi/ **ke-1**
Dengan : Aliansi Guru ASN Non Sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Selasa, 29 Januari 2018**
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat : **H. MARWAN DASOPANG**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Mendengar Masukan
Hadir : orang dari 50 orang Anggota
Perwakilan Aliansi Guru ASN Non Sertifikasi di Lingkungan Kemenag RI

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Audiensi Komisi VIII DPR RI pada pukul 12.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada audiensi Aliansi Guru ASN Non Sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI, maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Tunjangan kinerja guru ASN Non Sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan, Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama RI, belum dibayarkan. Alasan yang didapat dari Kementerian Agama RI karena anggaran belum dialokasikan.
2. Namun juga, ada guru ASN Non Sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI yang sudah mendapat tunjangan kinerja seperti di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan kinerja guru ASN Non Sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI belum mencerminkan keadilan. Sumber anggaran pembayaran tunjangan kinerja yang di Provinsi Jawa Timur diambilkan dari selisih anggaran tunjangan kinerja pejabat struktural yang tidak terserap.
3. Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan alokasi anggaran untuk membayar tunjangan kinerja guru ASN di lingkungan Kementerian Agama RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.50 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

H. MARWAN DASOPANG